

**PERAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG PELANGI DI
KELURAHAN RANDUSARI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA
SEMARANG**

Retha Pramesti, Kismartini, Sri Suwitri

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof.H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) policy was implemented by the Mayor of Semarang with the aim of overcoming problems related to housing and slum areas in Semarang City, especially in the Kampung Pelangi area. The implementation of the KOTAKU policy involves several actors, namely the government, the private sector, and the community with different roles. This research aims to analyze the role of actors as well as supporting factors and inhibiting factors in the role of actors in the development of Pelangi Village tourism in Randusari Village. This research uses qualitative methods through a descriptive approach and is conducted by observation and interviews based on purposive sampling techniques. The results showed that the role of actors in the development of Pelangi Village tourism, namely actors who act as policy makers, has functioned well, but to optimize the policy, the involvement of other actors is needed. Actors who act as coordinators have not run optimally. All government actors act as facilitators, both physical and non-physical. However, private actors as facilitators have not performed their roles optimally. Actors who act as implementers have not been optimal, especially for Pokdarwis and communities who experience obstacles in managing tourist attractions. Supporting actors are tasked with following the direction of the Semarang City Government. Then in developing Kampung Pelangi tourism, there are also several factors that become supporters and obstacles.

Keywords : Role, Actors, Tourism Development

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat kebijakan mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan ini ditujukan untuk menciptakan kota bebas kumuh sebagai

target RPJMN tahun 2015-2019. Direktorat Jenderal Cipta Karya membentuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mendukung gerakan 100-0-100 (100% akses

air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi memadai).

Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Indonesia. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik. Gonsalves dalam Iqbal (2005) menjelaskan bahwa aktor implementasi adalah mereka yang memberikan dampak atau terkena dampak dari kebijakan, program, dan aktivitas tersebut. Riant Nugroho (2014) mengungkapkan peran aktor dalam pembangunan, yaitu sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan pendukung. Mathis (2000) mengungkapkan tiga peran aktor dalam pengembangan pariwisata, yaitu sebagai regulator, fasilitator, serta pengelola dan pelaksana.

Di Kota Semarang, Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang. Dokumen ini menggambarkan wilayah-wilayah kumuh di Kota Semarang yang tersebar di 63 kelurahan dengan luas ± 415,83 Ha.

Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan KOTAKU untuk transformasi

wilayah kumuh menjadi lebih tertata, memperluas wilayah penghijauan, melibatkan masyarakat, memperbaiki lingkungan, dan meningkatkan potensi sosial ekonomi masyarakat. Program KOTAKU di Kampung Wonosari melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Program KOTAKU bertujuan untuk mentransformasi wilayah perkampungan kumuh menjadi lebih tertata rapih, memperluas wilayah penghijauan, lebih aktif melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar, memperbaiki lingkungan, dan meningkatkan potensi sosial ekonomi masyarakat.

Salah satu contoh keberhasilan dari program KOTAKU adalah Kampung Wonosari yang kini dikenal sebagai Kampung Pelangi dengan ciri khas yang unik. Pada awalnya, Kampung Pelangi merupakan kawasan pemukiman kumuh bernama Kampung Wonosari. Namun, melalui berbagai upaya renovasi dan revitalisasi, Pemerintah Kota Semarang berhasil mengubah Kampung Pelangi menjadi kawasan yang penuh warna dan artistic, dengan desain khusus yang melibatkan seluruh aktor yang terlibat.

Dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, peran aktor sangatlah penting.

Pemerintah Kota Semarang, sektor swasta seperti perusahaan cat, dan kelompok masyarakat seperti Pokdarwis Kampung Pelangi, memiliki peran masing-masing dalam pengembangan dan pemeliharaan kawasan ini sebagai destinasi wisata. Transformasi Kampung Pelangi telah meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi lokal. Namun, untuk mencapai kesuksesan program KOTAKU, partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat sangatlah penting.

Pengembangan Kampung Pelangi melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Penataan Ruang Kota Semarang untuk menyediakan fasilitas seperti gardu pandang dan toilet umum untuk wisatawan. Pemerintah dan sektor swasta juga berperan penting, misalnya PT Mowilex yang menyumbangkan cat untuk mengecat Kampung Pelangi. Komunitas seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) turut berperan dalam koordinasi dan promosi wisata.

Namun, setelah pandemi Covid-19, jumlah wisatawan menurun, menyebabkan kurangnya perawatan Kampung Pelangi. Beberapa masalah seperti cat yang memudar, kebersihan lingkungan yang buruk, dan partisipasi warga yang rendah menunjukkan

perlu perhatian lebih dalam perawatan dan pengembangan wisata Kampung Pelangi.

Penelitian ini bertujuan untuk peran aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang. Penelitian ini penting untuk mengetahui hubungan antar pihak dan peran penting dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian berjenis kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang khususnya di Kampung Pelangi. Fokus penelitian yaitu terkait dengan bagaimana Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kota Semarang. Teknik pengambilan subjek penelitian yang diterapkan adalah *purposive sampling*. Subjek penelitian, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Lurah Kelurahan Randusari, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Pelangi, serta Ketua RW 03 Kelurahan Randusari.

Data yang menjadi landasan penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui pendekatan *purposive sampling* dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis dan interpretasi data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode kualitas dan validitas data adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan pengujian keabsahan terkait informasi sumber yang dapat mendukung dan sesuai dengan penelitian. Sehingga triangulasi sumber ini dijadikan sebagai cara dalam memeriksa terkait keabsahan data untuk menyempurnakan, memvaliditas data, keakuratan informasi, serta originalitas banyak sumber untuk penelitian kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Konsep Robert Eyestone (1971;18) mengenai kebijakan publik merupakan hubungan salah satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini bisa dipahami dengan luas tetapi tidak pasti, karena kebijakan publik disini memiliki makna yang sangat banyak dalam berbagai hal.

Kemudian Thomas R. Dye (1975;1) menyampaikan pandangannya mengenai

kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah dalam menjalankan atau tidak menjalankan suatu hal (*Public policy is whatever the government decides to do or not do*). Meskipun batas yang diberi lumayan tepat, tetapi batasannya kurang membedakan secara jelas mengenai apa yang sudah diputuskan pemerintah dengan apa yang sebenarnya dijalankan oleh pemerintah.

Identifikasi Aktor

Rosidi & Fajriani (2013) menunjukkan bahwa di dalam governance terdapat beragam aktor yang dapat berpengaruh dalam prosesnya, yaitu meliputi :

1. Pemerintah. Sebagai aktor yang berpengaruh dalam proses tata kelola, pemerintah tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya pihak yang mengelola proses pemerintahan secara eksklusif. Sebaliknya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya karena keterbatasan sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya.
2. Sektor swasta memiliki sumber daya finansial yang diharapkan dapat berperan dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas, tanpa mengejar kepentingan pribadi yang melampaui kepentingan umum.

3. Masyarakat juga diminta untuk aktif berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai kemandirian dalam proses perkembangan masa depan.

Peran Aktor

Riant Nugroho (2014) mengungkapkan kategori peran aktor pada proses pembangunan berdasarkan kedudukannya, meliputi :

1. Pembuat kebijakan (*policy creator*) adalah aktor yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan.
2. Koordinator adalah aktor yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan aktor lainnya.
3. Fasilitator adalah aktor yang memiliki tugas untuk menyediakan dan mengakomodasi kebutuhan dari kelompok sasaran.
4. Pelaksana (*implementor*) adalah stakeholders yang bertugas untuk menjalankan kebijakan kepada kelompok sasaran.
5. Pendukung (*akselerator*) adalah aktor yang memiliki tugas untuk mempercepat dan berusaha agar program yang dijalankan sesuai tujuan serta dapat meraih tujuan lebih cepat.

Pengembangan Pariwisata

Cooper dkk (1995: 81) mengungkapkan bahwa dalam pengembangan destinasi wisata dapat tercapai jika memenuhi beberapa unsur seperti berikut ini :

1. Atraksi Wisata (*Attraction*) merupakan ciri khas yang menarik dan mampu memikat wisatawan untuk datang berkunjung ke lokasi objek wisata, meliputi daya tarik alam, buatan, ataupun budaya seperti tarian, festival, dan peringatan acara ulang tahun.
2. Fasilitas Pendukung (*Amenity*) merupakan layanan penunjang yang ada di sekitar objek wisata seperti penginapan, restoran, dan layanan pendukung lainnya yang tersedia selama 24 jam.
3. Aksesibilitas (*Accessibility*) merupakan kemudahan yang tersedia dalam objek wisata tersebut dan dapat dijangkau dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana seperti kendaraan motor, mobil sampai kendaraan umum lainnya.
4. Pelayanan Tambahan (*Ancillary*) merupakan organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab dan aktif terhadap pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran objek pariwisata.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung merupakan suatu faktor yang dapat memenuhi kebutuhan berupa fasilitas kepada seluruh orang ataupun kelompok terutama dalam suatu keahlian (Notoatmodjo, 2003). Faktor pendukung dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi terbagi menjadi dua bagian :

- a. Faktor Internal
- b. Faktor Eksternal

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang mempunyai sifat sebagai penghalang atau menahan untuk meraih tujuan yang telah disepakati. Faktor penghambat dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi dapat dilihat melalui dua faktor, yaitu (Sutaryono, 2015: 22) :

- a. Faktor Intenal
- b. Fakator Eksternal

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi

1) Peran Sebagai Pembuat Kebijakan (*Policy Creator*)

Aktor dari sektor pemerintah yang berperan sebagai pembuat kebijakan yaitu terdapat Pemerintah Kota Semarang melalui Walikota Semarang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Salah satu

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait pengembangan wisata Kampung Pelangi yaitu terdapat pada penetapan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang.

Pada dasarnya, penerapan Surat Keputusan (SK) ini dilakukan oleh Walikota Semarang untuk mengatasi permasalahan terkait kawasan permukiman kumuh di Kota Semarang. Berkaitan konteks tersebut, Kampung Wonosari termasuk daerah sebagai kategori kawasan pemukiman yang kumuh, tidak teratur, dan kurang layak di Kota Semarang. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut membuat Pemerintah Kota Semarang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah terkait kawasan lingkungan dan permukiman kumuh di Kampung Wonosari.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang menerapkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah di wilayah Kota Semarang. Program KOTAKU pertama kali dirancang pada tahun 2015 oleh Dirjen Cipta Karya yang menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Indonesia.

Penerapan program KOTAKU di wilayah Kota Semarang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan memberikan perintah kepada setiap Kelurahan untuk memunculkan inovasi baru. Pemerintah Kota Semarang mendorong terciptanya inovasi baru yang merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai suatu inovasi untuk melihat berbagai potensi yang ada di setiap daerah supaya bisa berkembang menjadi sarana destinasi pariwisata tambahan dan bisa membantu pembangunan wilayah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, wilayah Kelurahan Randusari di Kecamatan Semarang Selatan memunculkan suatu inovasi berupa Kampung Pelangi untuk diterapkan di wilayah Kampung Wonosari. Setelah proses pembangunan wilayah Kampung Pelangi selesai dilakukan, wilayah Kampung Wonosari berhasil merubah citra buruk yang dahulu melekat dan berubah menjadi salah satu wilayah yang menarik di Kota Semarang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga berperan sebagai pembuat kebijakan melalui pembuatan dan penetapan

Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor B/1442/556/IV/2023 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Wisata Kampung Pelangi” di Wonosari, Randusari, Semarang Selatan.

Pembuatan surat keputusan Pokdarwis bertujuan untuk mengatur tentang pemberian dan pengesahan tanggung jawab yang diberikan kepada kelompok masyarakat Kampung Pelangi melalui organisasi Pokdarwis.

2) Peran Sebagai Koordinator

Dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, aktor dari sektor pemerintah yang berperan sebagai koordinator adalah Pemerintah Kota Semarang melalui Walikota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Penataan Ruang (Distaru), dan Kelurahan Randusari.

Peran sebagai koordinator yang dijalankan oleh Walikota Semarang dengan membantu memenuhi seluruh kebutuhan terkait pengembangan pariwisata Kampung Pelangi melalui koordinator dengan melibatkan aktor-aktor lainnya seperti Dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan seluruh masyarakat Kampung Pelangi. Bentuk

koordinator yang dilakukan oleh Walikota Semarang bertujuan supaya dapat membentuk rasa persatuan dan keselarasan untuk ikut membantu mengembangkan wisata Kampung Pelangi. Sebab jika terdapat arahan atau perintah yang disampaikan oleh Walikota Semarang akan lebih dihormati oleh aktor lainnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki tugas koordinasi bersama dengan Pokdarwis Kampung Pelangi dan Lurah Kelurahan Randusari. Proses koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki peran yang penting untuk meraih keberhasilan dan mengoptimalkan program yang sudah dirancang sebelumnya bersama aktor-aktor yang terkait.pengembangan wisata Kampung Pelangi.

Selanjutnya, bentuk koordinator juga dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang (Disperkim) melalui pemberian bantuan berupa pembuatan proposal yang berisi tentang kebutuhan di wilayah Kampung Pelangi. Pembuatan proposal yang dilakukan Disperkim dapat lebih memudahkan kerjasama yang terjalin antara sektor

pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat.

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (Distaru) juga berperan sebagai koordinator dengan tugas dan fungsi sebagai aktor yang menerima usulan dan menjalankan perintah dari atasan, membantu mendata seluruh kebutuhan masyarakat, menilai kondisi yang sebenarnya terjadi di lokasi, membuat proposal berisi tentang pengajuan pengecatan ulang kepada perusahaan swasta di wilayah Kota Semarang, serta mengkoordinasi dan menggandeng berbagai perkumpulan perusahaan kontraktor ada di Semarang.

Pihak Kelurahan Randusari memiliki tugas untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan antara kepentingan masyarakat dengan Pemerintah. Sehingga membuat pihak Kelurahan Randusari memiliki peran sebagai koordinator dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Lurah Randusari adalah mewadahi dan menyampaikan seluruh aspirasi yang disampaikan dari masyarakat terutama dari masyarakat di wilayah Kampung Wonosari. Kemudian pihak Kelurahan Randusari memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut kepada pihak pemerintahan atau dinas terkait.

Lurah Randusari melakukan pertemuan secara langsung dengan pihak Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membicarakan permasalahan terkait kekusuman cat yang perlu dilakukan pengecatan ulang kembali, dan meminta pihak Sekda untuk menggandeng pihak swasta seperti Perusahaan cat yang ada di Kota Semarang supaya dapat ikut kembali bekerja sama dalam proses pengecatan ulang tersebut.

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kampung Pelangi memiliki peran sebagai koordinator. Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi bertugas untuk memberikan informasi dan mensosialisasikan setiap kegiatan kepada seluruh masyarakat. Selain itu, ketua Pokdarwis juga mengkoordinatori pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah dengan melibatkan Kelompok PKK. Pokdarwis Kampung Pelangi juga berperan sangat kuat sebagai koordinator dalam menyebarkan berbagai paket wisata kepada wisatawan yang datang ke objek wisata Kampung Pelangi. Pembuatan paket wisata yang dilakukan Pokdarwis bertujuan supaya bisa menarik dan mendatangkan kembali wisatawan secara lebih banyak ke objek wisata Kampung Pelangi.

Ketua RW 03 dan masyarakat Kampung Pelangi juga bertugas menjadi penghubung

dengan berbagai aktor dan mengkoordinasikan proses berjalannya pengembangan objek wisata Kampung Pelangi sesuai arahan yang diberikan oleh Pemerintah.

3) Peran Aktor Sebagai Fasilitator

Walikota Semarang memiliki peran sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan berupa sertifikat tanah secara gratis bagi masyarakat Kampung Wonosari. Pemberian bantuan berupa sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Walikota Semarang menjadi tahap awal dan bentuk tanggung jawab penerapan program Kampung Pelangi di wilayah Kampung Wonosari.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga memiliki peran sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan secara non-fisik berupa program pelatihan, motivasi, serta sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperluas jaringan wisata secara lebih luas lagi, serta meningkatkan perekonomian masyarakat secara lebih baik lagi kedepannya. Program pemberdayaan ini sudah disusun dan dirancang Bersama dengan Pemerintah Kota Semarang serta aktor-aktor lainnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ikut berperan

sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan berupa fasilitas toilet umum yang dibangun di setiap pos dekat Pasar Kembang Kalisari. Selain itu, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang juga ikut memberikan bantuan berupa dua buah toilet umum di wilayah RT 10, serta membantu mengatasi permasalahan terkait akses jalan dan prosedur parkir di wilayah Kampung Pelangi.

Kelurahan Randusari juga berencana membantu memberikan fasilitas dengan menerapkan kembali objek wisata air. Sebelumnya objek wisata air di Kampung Pelangi sudah terlaksana, namun terpaksa terhenti karena terdapat masalah terkait pandemi Covid-19 dan masalah debit air sungai kalisari yang tidak tetap

Kemudian seluruh aktor swasta yaitu PT. Mowilex, PT. Propan Indonesia, PT. Nippon Paint, dan Bank Rakyat Indonesia memiliki peran yang sama sebagai fasilitator melalui kerjasama yang telah disepakati bersama melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pelaksanaan Kerjasama dilakukan sejak tahun 2017 melalui pemberian bantuan pendanaan berupa cat untuk Kampung Pelangi. Kemudian pada tahun 2019, pihak perusahaan cat kembali memberikan bantuan

pendanaan berupa cat untuk melakukan pengecatan ulang wisata Kampung Pelangi.

Selain itu, Bank BRI juga turut serta membantu mengelola pengembangan wisata Kampung Pelangi melalui program pembersihan dan penataan wilayah Sungai Kalisari, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan lingkungan, memberdayakan dan mengelola sampah-sampah yang ada di wilayah Kampung Pelangi, memberikan dukungan dalam pembangunan sarana dan prasarana di sekitar Sungai Kalisari berupa taman bermain dan ruang terbuka, dan memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar dengan memanfaatkan peran dari Agen BRILink.

4) Peran Aktor Sebagai Pelaksana (*Implementor*)

Aktor yang memiliki peran sebagai pelaksana yaitu terdapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terutama pada bidang kelembagaan yang membuat program kemasyarakatan, seperti Bimbingan Teknik (Bimtek), sosialisasi, dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 1. 1 Program Pelatihan Yang Diberikan Disbudpar

No	Jenis Program Pelatihan	Pelaksanaan
1.	Pelatihan Peningkatan Inovasi	Tahun 2023

	Dan Higienitas Sajian Kuliner	
2.	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	Tahun 2023
3.	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	Tahun 2023
4.	Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Kelembagaan Pokdarwis	Tahun 2023
5.	Pelatihan Keamanan Dan Keselamatan Di Daya Tarik Wisata	Tahun 2023
6.	Pelatihan Kebersihan Lingkungan Sanitasi Dan Pengelolaan Sampah Di Destinasi Pariwisata	Tahun 2023
7.	Pembekalan Pemandu Ekowisata	Tahun 2023

Sumber : Pokdarwis Kampung Pelangi (2024)

Program pelatihan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk masyarakat Kampung Pelangi bertujuan untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih baik. Kemudian Disbudpar bidang pemasaran juga ikut membantu pelaksanaan pengembangan wisata Kampung Pelangi dengan membantu mempromosikan objek wisata melalui media sosial Instagram dan website resmi Disbudpar.



Gambar 1. 1 Promosi yang dilakukan Disbudpar

Sumber : Instagram Disbudpar (2024)

Pihak Kelurahan Randusari juga berperan sebagai pelaksana dalam membantu pengembangan wisata Kampung Pelangi melalui pembentukan organisasi kemasyarakatan Pokdarwis dan UMKM yang berasal dari masyarakat Kampung Pelangi. Pembentukan organisasi kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk memajukan taraf hidup bagi masyarakat setempat.



Gambar 1. 2 Brosur Paketan Wisata Kampung Pelangi

Sumber : Dokumen Pokdarwis Kampung Pelangi (2024)

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kampung Pelangi memiliki peran yang sama sebagai pelaksana. Tugas yang dilaksanakan oleh Pokdarwis Kampung Pelangi adalah dengan menjual berbagai produk yang ada di objek wisata Kampung Pelangi dengan membuat berbagai jenis paketan wisata, Pokdarwis Kampung Pelangi juga bertugas untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait pelaksanaan program pelestarian lingkungan.

Seluruh masyarakat Kampung Pelangi juga berperan sebagai pelaksana dengan tugas yaitu hanya mengawasi dan ikut membantu jika ada program Pembangunan, serta ikut merawat seluruh fasilitas yang ada dilokasi wisata. Masyarakat Kampung Pelangi ikut memberikan sambutan berupa persembahan kesenian tari khas Kampung Pelangi kepada rombongan wisatawan.

5) Peran Aktor Sebagai Pendukung (Akselerator)

Aktor yang memiliki peran sebagai pendukung (*akselerator*) adalah Kelurahan Randusari. Tugas yang dijalankan oleh Lurah Randusari dalam membantu percepatan pengembangan wisata Kampung Pelangi adalah dengan ikut mempromosikan objek wisata Kampung Pelangi melalui sarana media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, dan melakukan promosi secara langsung melalui penyebaran informasi dari teman ke teman.

Kemudian Pokdarwis Kampung Pelangi juga berperan sebagai aktor pendukung dengan tugas yaitu mewadahi seluruh inovasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian inovasi tersebut akan disampaikan kepada pihak Kelurahan Randusari untuk didiskusikan secara bersama-sama. Seluruh masyarakat Kampung Pelangi juga berperan

sebagai aktor pendukung dengan tugas yaitu ikut serta membantu menerapkan program atau kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah atau Dinas, seperti pada kegiatan pengecatan ulang yang ikut melibatkan masyarakat.

Organisasi Karang Taruna memiliki peran yang sama sebagai aktor pendukung yang dilakukan dengan memberikan pendampingan terhadap anak-anak yang mengaji di Kampung Pelangi, melaksanakan dan menyelenggarakan setiap acara seperti acara Peringatan Kemerdekaan Indonesia, dan membantu seluruh keperluan Pokdarwis Kampung Pelangi seperti membantu membuat akun media sosial Instagram dan Facebook. Setiap acara yang dibuat oleh organisasi Karang Taruna Kampung Pelangi didasari oleh arahan dari Pokdarwis Kampung Pelangi dan Lurah Randusari.

Selain itu, Kelompok PKK juga memiliki peran yang sama sebagai aktor pendukung yang dilakukan dengan memberi sambutan kepada para wisatawan yang datang ke wisata Kampung Pelangi, dan membuat souvenir dan cinderamata khas Kampung Pelangi seperti gantungan kunci dan gelang. Pembuatan souvenir dan cinderamata ini bertujuan supaya dapat memberikan kesan dan kenangan bagi setiap pengunjung yang

berkunjung ke destinasi pariwisata Kampung Pelangi.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat

1) Faktor Pendukung

a) Internal

Pengembangan wisata Kampung Pelangi didukung oleh beberapa faktor internal, termasuk keterlibatan berbagai organisasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Disperkim, Distaru, DPU, dan Disbudpar Kota Semarang serta Pokdarwis Kampung Pelangi yang dibentuk pada 2017 berperan penting. Pembaruan kepengurusan Pokdarwis pada 2023 membuatnya lebih aktif dan melibatkan masyarakat dalam berbagai program pemerintah. Selain itu, UMKM di Kampung Pelangi, seperti UMKM Wingko Babat, kerajinan tangan, dan kerajinan *hand bouquete*, turut mendukung pengembangan wisata dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

Lurah Randusari, Bapak Fanni, merencanakan untuk menghidupkan kembali wisata air yang sempat berhenti akibat pandemi Covid-19. Wisata air ini memanfaatkan potensi Sungai Kalisari dengan fasilitas seperti perahu kayu dan ban plastik yang disewakan kepada wisatawan. Rencana ini diharapkan dapat menarik lebih

banyak pengunjung dan mendukung perkembangan wisata Kampung Pelangi. Dengan keterlibatan organisasi, dukungan UMKM, dan rencana inovatif dari pemerintah lokal, Kampung Pelangi memiliki potensi untuk berkembang lebih baik dan meningkatkan jumlah wisatawan.

b) Eksternal

Selain faktor internal, pengembangan wisata Kampung Pelangi juga didukung oleh faktor eksternal. Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan berupa pelatihan kepada masyarakat Kampung Pelangi untuk meningkatkan motivasi dan kualitas mereka. Bantuan ini bertujuan agar masyarakat dapat menunjukkan keahlian mereka dan mendukung pengembangan wisata Kampung Pelangi. Dengan demikian, diharapkan pengembangan wisata Kampung Pelangi akan lebih maju dan masyarakatnya akan merasakan dampak positif dari keberadaan objek wisata tersebut.

2) Faktor Penghambat

a) Internal

Pengembangan wisata Kampung Pelangi terhambat oleh beberapa faktor internal. Salah satunya adalah kurangnya kekompakan antara masyarakat dan kepengurusan Pokdarwis. Pada masa kepengurusan Pokdarwis sebelumnya, kurangnya

komunikasi yang baik dari Ketua Pokdarwis menyebabkan organisasi menjadi tidak aktif dan wisata Kampung Pelangi tidak berkembang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membantu mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan untuk memperbarui kepengurusan Pokdarwis. Pembaruan ini membuat organisasi lebih aktif dalam mengkoordinasikan informasi dan melibatkan masyarakat serta anggota dalam setiap kegiatan. Namun, masalah internal tetap ada, terutama terkait kesibukan anggota yang menyebabkan hanya sebagian yang terlibat dalam kegiatan. Ketua Pokdarwis juga merasa tidak memiliki hak untuk memaksa anggotanya untuk selalu terlibat.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam mengembangkan wisata Kampung Pelangi. Wisata di wilayah perkotaan, seperti Kampung Pelangi, tidak mendapatkan anggaran tetap dari pemerintah seperti halnya wisata di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes). Akibatnya, objek wisata ini mengalami kesulitan dana. Meski begitu, beberapa aktor seperti Lurah, masyarakat, dan dinas terkait berusaha

mencari bantuan dana melalui CSR untuk melanjutkan pengelolaan Kampung Pelangi.

b) Eksternal

Pengembangan wisata Kampung Pelangi juga terhambat oleh faktor eksternal, seperti pandemi Covid-19 yang mengurangi jumlah pengunjung dan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada aktivitas berjualan. Sebelum pandemi, wisatawan banyak berkunjung, tetapi setelah pandemi, jumlah pengunjung menurun drastis karena kekhawatiran penularan virus dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pandemi juga berdampak pada mata pencaharian warga yang harus berhenti berjualan. Setelah pandemi mereda, banyak yang kesulitan melanjutkan usaha karena kekurangan modal. Selain itu, cat-cat di Kampung Pelangi yang luntur dan kusam membuat objek wisata kurang menarik. Upaya pengecatan ulang yang diusulkan lurah memerlukan dana besar dan sponsor dari pihak swasta, yang hingga kini belum terealisasi.

Faktor eksternal lainnya adalah perubahan kepemimpinan Walikota Semarang pada tahun 2021, yang menyebabkan perbedaan prioritas dan perhatian terhadap wisata Kampung Pelangi. Kerjasama yang sebelumnya terjalin dengan

sektor swasta juga terhenti karena belum ada kesepakatan baru dengan pemerintahan yang baru. Untuk melanjutkan pengembangan wisata Kampung Pelangi, diperlukan kerjasama dan kesepakatan baru antara Walikota Semarang yang sekarang dan sektor swasta. Jika tercapai, proses pengembangan dapat dilanjutkan dengan dukungan semua pihak.

KESIMPULAN

A. Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi, Yaitu :

- 1) Aktor yang berperan sebagai Pembuat Kebijakan, yaitu Pemerintah Kota Semarang melalui Walikota Semarang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telah berfungsi dengan baik. Namun, untuk mengoptimalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor tersebut, diperlukan keterlibatan aktor lain seperti masyarakat agar kebijakan dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan masalah di masa depan.
- 2) Aktor yang berperan sebagai koordinator utama dipegang oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Walikota Semarang, meskipun efektivitasnya belum maksimal akibat pergantian kepemimpinan. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang, dan Kelurahan Randusari juga berperan dalam mengoordinasi berbagai kepentingan masyarakat. Namun, proses koordinasi oleh OPD ini masih belum optimal karena keputusan akhir tetap harus menunggu persetujuan Walikota Semarang. Sementara itu, aktor masyarakat seperti Pokdarwis Kampung Pelangi, Ketua RW 03, dan seluruh warga Kampung Pelangi juga berperan dalam mengoordinasi program-program yang diusung oleh pemerintah, memastikan program tersebut supaya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- 3) Peran sebagai Fasilitator telah dijalankan dengan baik oleh semua aktor dalam sektor pemerintahan. Fasilitas yang diberikan mencakup bantuan fisik dan non-fisik untuk mendukung pengembangan objek wisata secara optimal. Namun, saat ini bantuan fasilitas dari aktor swasta belum berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh ketidakberlanjutan komitmen dengan aktor swasta sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari aktor swasta baru untuk memfasilitasi pengembangan wisata Kampung Pelangi. Hingga saat ini, belum ditemukan aktor

swasta baru yang dapat membantu memfasilitasi kebutuhan pengembangan wisata Kampung Pelangi.

- 4) Peran sebagai Pelaksana (Implementor) dipegang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Kelurahan Randusari, Pokdarwis Kampung Pelangi, dan seluruh masyarakat Kampung Pelangi. Semua aktor yang terlibat sebagai pelaksana memiliki dampak besar terhadap proses pengembangan wisata Kampung Pelangi. Jika tugas yang mereka emban tidak berjalan lancar, maka pengembangan wisata dapat terhambat. Sampai saat ini, perkembangan wisata Kampung Pelangi belum optimal karena mengalami kendala dari Pokdarwis dan masyarakat sebagai pengelola objek wisata.
- 5) Peran sebagai Pendukung (Akselerator) dipegang oleh Kelurahan Randusari, Pokdarwis Kampung Pelangi, Karang Taruna, Kelompok PKK, dan seluruh masyarakat Kampung Pelangi. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan wisata agar berjalan optimal. Meskipun seluruh proses pengembangan masih memerlukan persetujuan dan arahan dari Pemerintah Kota Semarang, namun

mereka tetap gigih dalam berupaya mengembangkan wisata secara mandiri.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1) Faktor Pendukung

- a. Internal, mencakup keterlibatan berbagai organisasi yang turut serta secara sukarela dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, pendirian Pokdarwis Kampung Pelangi yang bertujuan mengelola langsung objek wisata tersebut, pembentukan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari masyarakat setempat, serta pemanfaatan potensi yang ada di wilayah Kampung Pelangi seperti Sungai Kalisari yang dijadikan objek wisata air.
- b. Eksternal mencakup bantuan dari pihak luar, seperti Pemerintah Kota Semarang, yang membantu memenuhi kebutuhan dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi

2) Faktor Penghambat

- a. Internal, termasuk dalam hal kurangnya solidaritas di antara warga dan antara pengurus Pokdarwis, lemahnya organisasi Pokdarwis dalam mengelola diri sendiri, dan keterbatasan anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan objek wisata Kampung Pelangi.
- b. Eksternal mencakup dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi Kampung Pelangi, serta kondisi objek wisata yang memburuk, seperti cat yang luntur, kusam, dan rusak, membuatnya kurang menarik. Selain itu, sulitnya mencari sponsor baru dan kurangnya komitmen dari sektor swasta menghambat pengembangan Kampung Pelangi, termasuk program pengecatan ulang. Pergantian Walikota Semarang juga menyebabkan perubahan dalam program kerja dan prioritas pemerintah terhadap Kampung Pelangi, yang semakin menghambat pengembangannya

SARAN

1. Sebagai aktor pembuat kebijakan, akan lebih efektif jika melibatkan aktor dari sektor lain, seperti masyarakat dan swasta. Partisipasi aktor-aktor ini dalam proses pembuatan kebijakan bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih optimal dan mencegah timbulnya masalah di masa depan.
2. Dalam melakukan koordinasi, Walikota Semarang sebagai aktor dengan kepentingan tertinggi harus berperan aktif untuk menarik minat sektor swasta

agar mau bekerja sama dalam proses pengecatan ulang. Keterlibatan langsung dari Pemerintah Pusat akan memudahkan kerja sama dengan sektor swasta, sehingga dapat memfasilitasi semua kebutuhan objek wisata Kampung Pelangi.

3. Seluruh aktor yang terlibat dalam proses pengembangan wisata Kampung Pelangi perlu mencari cara yang menarik untuk menjalin kerjasama dengan aktor swasta sebagai fasilitator. Hal ini perlu dilakukan dengan secepatnya supaya kegiatan pengecatan ulang dapat segera terlaksana, sehingga proses pengembangan wisata dan penarikan minat wisatawan dapat kembali dilaksanakan dengan optimal.
4. Sebagai pelaksana, semua aktor yang terlibat diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempromosikan objek wisata Kampung Pelangi dengan lebih menarik. Upaya ini penting untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke objek wisata tersebut. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya, informasi terkini dapat disebarluaskan secara luas dan objek wisata Kampung Pelangi dapat dipromosikan dengan cara yang kreatif. Penggunaan media sosial dan

platform digital ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Kampung Pelangi dan secara bersamaan mendukung pengembangan wisata di sana.

5. Sebagai aktor pendukung, kesadaran dan partisipasi semua pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Langkah-langkah yang bisa diambil meliputi memberikan dukungan penuh terhadap setiap instruksi pemerintah dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, diharapkan seluruh potensi di objek wisata Kampung Pelangi dapat diberdayakan, serta mengubah pola pikir negatif masyarakat terhadap proses pengembangan wisata di Kampung Pelangi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACHMAD, F. J. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kampung Pelangi di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Faculty Of Social And Political Sciences).
- Aryaningtyas, A. T., Aprilliyani, R., & Soehari, H. (2021). Pengembangan kawasan kampung pelangi Semarang: Persepsi dan dukungan masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(1), 278-304.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat

- Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Fauzi, A. N., & Rostyaningsih, D. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 356-374.
- Febriandini, A. P., Warsono, H., Azlansyah, S. S., & Sipayung, A. Z. (2019). Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Di Kampung Pelangi. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 5(1), 183-198.
- Hekmatyar, G. A., Kismartini, K., & Santoso, R. S. (2015). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan Di Kecamatan Banyumanik. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1), 122-135.
- Khaerini, I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Pariwisata di Kampung Pelangi Kota Semarang.
- Lailia, I., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 10(3), 194-207.
- Nugroho, A. B. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Objek Pariwisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik.
- Purba, G. P., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). *MODEL JARINGAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA WISATA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG\07\ADM. PUBLIK\2021* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- Putri, A. S. (2019). *ANALISIS KOMUNIKASI PARTISIPATIF KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM MEMBANGUN KAMPUNG PELANGI SEMARANG SEBAGAI DESTINASI WISATA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Putri, C. (2019). *PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG PELANGI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Widiastuti, R. N., & Yuwono, T. (2019). Inovasi Kampung Tematik di Kota Semarang, Pembangunan Kawasan Kumuh Berbasis Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Kampung Sehat Ramah Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 351-360.
- Wulandari, S. S., & Luthfi, A. (2019). Hiperealitas Kampung Pelangi Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 7(2), 462-479.